

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih menjadi masalah di setiap negara hingga saat ini. Menjadi titik fokus dan isu dalam pembangunan negara, khususnya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang mempengaruhi setiap negara di dunia, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berkembang, namun tantangan yang dihadapi setiap negara adalah unik. Indonesia adalah negara berkembang yang telah lama berjuang melawan kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan masalah pertumbuhan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu mengatasinya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus-menerus harus ditangani. Kemiskinan masih menjadi masalah di tengah negeri, dan gejala kemiskinan yang terus meningkat, sebuah situasi multifaset yang masih dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kantong-kantong kemiskinan di seluruh negeri, mulai dari daerah dataran tinggi hingga masyarakat yang tinggal di dekat hutan, nelayan desa setempat yang miskin di pedesaan, dan kawasan kumuh di perkotaan. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta merupakan tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Data skala besar Badan Pusat

Statistik tentang individu yang kurang beruntung mengungkapkan disparitas demografis antara Jawa dan pulau-pulau Indonesia lainnya. Untuk menggambarkan bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan di pulau jawa dan pulau sumater. Penulis menunjukkannya pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi (Pulau Jawa)

Provinsi	Jumlah			
	2020		2021	
	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (September)	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (September)
DKI Jakarta	4.53%	4.90%	4.72%	4.67%
Jawa Barat	7.88%	8.43%	4.80%	7.97%
Jawa Tengah	11.41%	11.84%	11.79%	11.25%
D.I. Yogyakarta	12.28%	11.46%	12.80%	11.40%
Jawa Timur	11.09%	11.50%	11.40%	10.60%
Banten	5.92%	6.63%	6.66%	6.50%

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020, 2021)

Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa provinsi-provinsi di kedua pulau mengalami penurunan persentase kemiskinan, kecuali Aceh yang justru meningkat di tahun 2021. Dari data tersebut juga dapat digambarkan bahwa tren penurunan kemiskinan ini lebih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera daripada Pulau Jawa merujuk pada besaran angka penurunannya yang secara keseluruhan dari pulau yang ada, Pulau Sumatera memiliki kecenderungan mengalami penurunan sebesar 4,5 %, sedangkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa hanya 4,2 %.

Tabel 1. 2
Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi (Pulau Sumatera)

Provinsi	Jumlah		Jumlah	
	2020		2021	
	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (September)	Smt 1 (Maret)	Smt 2 (September)
Aceh	14.99	15.43	15.33	15.53
Sumatera Utara	8.75	9.14	9.01	8.49
Sumatera Barat	6.28	6.56	6.63	6.04
Riau	6.82	7.04	7.12	7.00
Jambi	7.58	7.97	8.09	7.67
Sumatera Selatan	12.66	12.98	12.84	12.79
Bengkulu	15.03	15.30	15.22	14.43
Lampung	12.34	12.76	12.62	11.67
Kep. Bangka Belitung	4.53	4.89	4.90	4.67
Kep. Riau	5.92	6.13	6.12	5.75

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020, 2021)

Kemiskinan di Indonesia akan terus meningkat sepanjang sejarah negara ini, karena pemerintah telah gagal menerapkan metode dan program penanggulangan kemiskinan, terutama bagi masyarakat miskin yang hidup di bawah strata terendah. Salah satu alasan seseorang menjadi miskin adalah jika kesempatan mereka untuk mendapatkan uang terbatas. Kemiskinan juga mengakibatkan anak-anak tidak dapat menerima pendidikan yang baik, masalah keuangan, kesulitan, dan kurangnya akses ke layanan publik, antara lain. Kemiskinan juga bisa membuat orang rela berkorban demi keselamatan dirinya sendiri.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan. Penduduk miskin

adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran bulanan per kapita yang lebih kecil dari garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, t.t.). Sedangkan kemiskinan menurut Kuncoro (2010) didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimal. Standar hidup rendah dikaitkan dengan kurangnya pendapatan secara keseluruhan, perumahan yang baik, layanan kesehatan dan sosial yang buruk, serta kurangnya pendidikan, yang mengakibatkan kurangnya sumber daya dan banyak orang menjadi pengangguran.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan semakin banyaknya kesempatan kerja maka akan mengakibatkan meningkatnya disparitas distribusi pendapatan (*ceteris paribus*), sehingga terjadi keadaan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kemiskinan (Tambunan, 2001). Sejumlah indikator ekonomi dapat digunakan untuk menentukan kemajuan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran adalah salah satunya. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat ditentukan apakah perekonomian suatu negara tumbuh atau menurun. Selain itu, dengan tingkat pengangguran yang rendah, terlihat disparitas distribusi uang yang diterima oleh penduduk negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari pergeseran tingkat ketinggian pekerjaan yang tidak diimbangi dengan total lapangan kerja yang cukup besar dan sebagian kecil dari daya penerimaan tenaga kerja yang condong. Ini karena penyediaan lapangan tingkat rendah untuk memfasilitasi aktivitas siap-daya (Lail, 2018).

Konsekuensi utama dari kemiskinan pada pengangguran di pasar tenaga kerja adalah hilangnya pendapatan, sumber daya penting yang diperlukan untuk kehidupan di ekonomi pasar (Layard, Nickell, & Jackman, 2005) dan kekurangan uang. Kemiskinan, lebih lanjut juga berkorelasi dengan rendahnya upah dan ikut menurunkan modal sosial yang tercermin dari pembangunan manusianya. Di sini bisa ditarik ‘benang merah’, bahwa kemiskinan yang salah satunya didorong oleh tingginya pengangguran akan semakin memperparah kualitas sumber daya manusia, dimana akses terhadap kebutuhan dasar semakin sempit, terlebih ketika tenaga kerja memiliki pekerjaan dengan upah minimum yang tidak mampu menjadi instrumen kecukupan angka kebutuhan dasar mereka.

Beberapa dekade penelitian telah mengumpulkan banyak bukti tentang dampak buruk pengangguran pada hasil terkait kemiskinan, serta status kesehatan individu (Gallie, Paugam, & Jacobs, 2003; McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005; Roelfs, Shor, Davidson, & Schwartz, 2011). Studi yang meneliti hasil terkait kemiskinan melaporkan bahwa pengangguran memiliki risiko lebih tinggi mengalami kemiskinan dan kekurangan materi karena pada hilangnya pendapatan dan tunjangan terkait pekerjaan (Gallie et al., 2003). Ketegangan finansial yang dialami oleh para penganggur ini akibatnya memanifestasikan dirinya sebagai mekanisme yang dapat menyebabkan rusaknya kesehatan (mokona). Bukti menunjukkan bahwa pengangguran mempengaruhi status kesehatan dalam banyak cara. Misalnya, pengangguran telah dikaitkan dengan stigmatisasi

(yaitu kehilangan pekerjaan dianggap sebagai posisi sosial yang ‘tidak diinginkan’) (Ikawati, 2019; Prawira, 2018), hilangnya peran dan jaringan sosial (Sugianto & Yul, 2020), dan/atau, pencarian pekerjaan baru yang semakin sulit, salah satunya karena pandemi (Kasnelly, 2020).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan landasan penelitian di latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2016-2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2016-2020

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2016-2020

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan model prediktif yang mengarah pada determinan kemiskinan wilayah. Sehingga, mampu menunjukkan secara lebih luas pada aspek manakah kemiskinan banyak dipengaruhi yang secara langsung atau tidak langsung berimplikasi misalnya pada perkembangan perekonomian suatu daerah.
2. Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi meskipun dalam skala mikro dalam bentuk tertulis sebagai salah satu instrumen yang bisa dipertimbangkan guna upaya-upaya menanggulangi kemiskinan yang berangkat dari sudut pandang UMP, IPM, dan/atau tingkat pengangguran di wilayahnya.

